

## **Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak**

**Faris Arkan<sup>a\*</sup>**

Email: [farisarkan098@gmail.com](mailto:farisarkan098@gmail.com)  
Universitas Tanjungpura Pontianak

---

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh realisasi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota tahun 2015 – 2019. Penelitian dilakukan dengan menghitung nilai kontribusi dari masing-masing variabel independen yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah kota Pontianak. Menggunakan pendekatan kuantitatif karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang analisisnya pada data-data numerik (angka) dan menggunakan rumus. Diketahui bahwa pajak hotel memiliki nilai kontribusi yang sangat kecil terhadap pendapatan asli daerah kota Pontianak atau tergolong kategori kontribusi sangat kurang berdasarkan tabel klasifikasi kriteria nilai kontribusi pajak daerah. Pajak Restoran memiliki kontribusi yang lebih baik dibandingkan dengan pajak hotel atau tergolong kategori kontribusi sedang berdasarkan tabel klasifikasi kriteria nilai kontribusi pajak daerah. Pajak Hiburan memiliki nilai kontribusi yang sangat paling kecil dibandingkan dengan dua variabel penelitian lainnya atau tergolong dalam kategori kontribusi sangat kurang berdasarkan tabel klasifikasi kriteria nilai kontribusi pajak daerah.

**Kata Kunci:** Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak.

---

### **1. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam pemerintahannya, memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang dilandasi oleh Undang-Undang dasar 1945, memberikan kewenangan yang ekstensif, nyata, dan bertanggung jawab kepada masing-masing daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Salah satu sumber daya yang dikelola oleh daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai pergantian atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dijadikan acuan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemungutan terhadap pajak-pajak tertentu, melaksanakan sejumlah upaya untuk dapat menghasilkan pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Semakin efektif pengelolaan yang dilakukan suatu daerah terhadap sumber daya yang dimiliki, maka akan berdampak positif terhadap perkembangan daerah tersebut.

Pemungutan pajak merupakan salah satu alternatif paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Pajak daerah juga dapat dijadikan sebagai gambaran tentang kontribusi masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan adalah jenis pajak daerah yang potensinya semakin bertumbuh seiring dengan berkembangnya sektor jasa dan pariwisata di suatu daerah.

Sebaran jumlah hotel, restoran dan tempat hiburan yang terdaftar di Kota Pontianak menjadi salah satu pertimbangan penulis untuk mengambil topik penelitian ini. Selain itu kota Pontianak menjadi tujuan turis domestik maupun manca negara pada saat perayaan-perayaan tertentu seperti imlek dan cap gomeh pada setiap tahunnya. Maka dirasa sektor perhotelan, resotoran, dan tempat hiburan yang ada di kota Pontianak dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar.

Beberapa penelitian sebelumnya yang mengambil topik serupa seperti penelitian yang dilakukan oleh (Fikri dan Mardani, 2017) yang berjudul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Batu. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh (Ervina Yulia Candra, 2015) dengan judul Pengaruh Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung terdapat salah satu variabel yang memiliki hasil negatif. Pajak Hotel memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap PAD kota Bandung. Sedangkan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan memiliki pengaruh yang positif terhadap PAD kota Bandung.

## **2. Kajian Literatur**

### **2.1 Landasan Teori**

Menurut Mardiasmo (2011: 1), "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pajak daerah adalah iuran yang dapat dipaksakan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung (Suparmoko, 2009). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan pajak yang dibayarkan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang bisa dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang diatur dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah akan menjadi subjek pajak. Sedangkan, wajib pajak adalah orang pribadi atau

badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran pajak.

Sesuai UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/kota terdiri dari:

- 1) Pajak hotel.
- 2) Pajak restoran.
- 3) Pajak hiburan.
- 4) Pajak reklame.
- 5) Pajak penerangan jalan.
- 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C.
- 7) Pajak parkir

Yang menjadi fokus dalam penelitian kali ini adalah kontribusi dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Pontianak tahun 2015-2019.

Teori yang melandasi penelitian ini adalah teori kontribusi. Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan (Handoko, 2013). Analisis Kontribusi pajak daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap PAD, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak terhadap PAD (Handoko, 2013).

Pajak hotel adalah pajak yang dibayarkan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Definisi hotel sendiri adalah fasilitas yang menyediakan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, persangrahan, wisma pariwisata, rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10, rumah penginapan dan sejenisnya.

Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Restoran adalah sarana penyediaan makanan atau minuman dengan memungut bayaran yang mencakup rumah makan, warung, kantin, kafetaria, bar dan jenis lainnya.

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan yang dimaksud dalam Perda Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 17, (3):

1. Tontonan film dan sejenisnya.
2. Pegelaran kesenian, music, tari, dan/atau busana.
3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
4. Pameran.
5. Diskotik, klab malam, karaoke, dan sejenisnya.
6. Akrobat, sirkus, dan sulap.
7. Permainan bowling, golf dan bilyar
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
9. Panti pijat, pusat kebugaran (fitness center), refleksi, dan mandi uap atau spa.
10. Pertandingan/pertunjukan olahraga.

### **3. Metode Penelitian**

#### **3.1. Bentuk Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan data- data yang diperoleh dari perusahaan/instansi sehingga dapat memberikan gambaran dengan keadaan yang sebenarnya.

#### **3.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data serta informasi di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Pontianak. Waktu penelitian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan.

#### **3.3. Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan mengunduh laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak di website resmi DISPENDA Kota Pontianak.

#### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, digunakan metode dokumentasi, yaitu suatu cara memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan penelitian sejarah melihat kembali laporan tertulis yang lalu berupa angka maupun keterangan (Arikunto, 1998). Adapun data yang dikumpulkan berupa data Time Series periode tahun 2015 – 2019, yang meliputi data Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Pajak Hotel, Pendapatan Pajak Restoran, dan Pendapatan Pajak Hiburan Kota Pontianak.

#### **3.5. Populasi Dan Sampel**

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemungutan pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan selama 5 (lima) tahun yaitu periode tahun 2015 – 2019 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak, sedangkan metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu penentuan sampel dengan pengambilan data tertentu yang dianggap sesuai dan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

#### **3.6. Variabel Penelitian**

##### **3.6.1. Variabel Dependen**

###### **1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah merupakan (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004).

##### **3.6.2. Variabel Independen**

###### **1) Pajak Hotel**

Pajak hotel adalah pajak yang dibayarkan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Definisi hotel sendiri adalah fasilitas yang menyediakan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, persangrahan, wisma pariwisata, rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari

10, rumah penginapan dan sejenisnya (Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Pontianak).

2) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Restoran adalah sarana penyediaan makanan atau minuman dengan memungut bayaran yang mencakup rumah makan, warung, kantin, kafetaria, bar dan jenis lainnya (Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Pontianak).

3) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan (Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Pontianak).

### 3.7. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan secara kuantitatif yaitu metode deskriptif untuk mendapatkan gambaran lebih jelas dan terperinci mengenai suatu keadaan berdasarkan data atau informasi yang telah didapatkan. Kemudian data atau informasi tersebut dikumpulkan sehingga didapatkan informasi yang diperlukan untuk menganalisis masalah yang ada. Menggunakan pendekatan kuantitatif karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang analisisnya pada data-data numerik (angka) dan menggunakan rumus.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak daerah terhadap PAD:

$$Pn = \frac{Q_x}{Q_y} \times 100\%$$

Pn = Kontribusi Pajak X terhadap PAD

Qx = Realisasi Pajak X

Qy = Realisasi Pendapatan Asli Daerah

N = Tahun Tertentu

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Dipdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 (dalam Velayati, 2013)

#### 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

##### 4.1. Hasil Penelitian

##### 4.1.1. Persentase Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak tahun 2015 – 2019

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana Pajak Hotel memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Untuk mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak hotel periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD adalah:

$$Pn = \frac{Q_x}{Q_y} \times 100\%$$

Pn = Kontribusi Pajak X terhadap PAD.

Qx = Realisasi Pajak X

Qy = Realisasi Pendapatan Asli Daerah.

N = Tahun Tertentu.

Tabel 2. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD.

Tahun (Pn)	Penerimaan Pajak Hotel (Qx)	Realisasi PAD 2015-2019 (Qy)	Konstanta	Hasil
2015	17068074579	243129588155	100%	7,02%
2016	19056138821	261446717628	100%	7,29%
2017	21132076569	305147586493	100%	6,93%
2018	26147351066	310633949252	100%	8,42%
2019	26107329737	333663494389	100%	7,82%

Sumber: Data Olahan.

Dari tabel 2, terlihat bahwa pada tahun 2015 Pajak Hotel telah memberikan sumbangan atau kontribusinya bagi PAD Kota Pontianak sebesar 7,02% dari total penerimaan PAD sebesar Rp. 243.129.588.155. Tahun 2016 sebesar 7,29% dari total penerimaan PAD sebesar Rp. 261.446.717.628. Tahun 2017 sebesar 6,93% dari total penerimaan PAD sebesar Rp. 305.147.586.493. Tahun 2018 sebesar 8,42% dari total penerimaan PAD sebesar Rp. 310.633.949.252. dan tahun 2019 sebesar 7,82% dari total penerimaan PAD sebesar 333.663.494.389.

##### 4.1.2. Persentase Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak tahun 2015 – 2019

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana Pajak Hotel memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Untuk mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak hotel periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD adalah:

$$Pn = \frac{Q_x}{Q_y} \times 100\%$$

Pn = Kontribusi Pajak X terhadap PAD  
 Qx = Realisasi Pajak X  
 Qy = Realisasi Pendapatan Asli Daerah  
 N = Tahun Tertentu

Tabel 3. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD.

Tahun (Pn)	Penerimaan Pajak Hotel (Qx)	Realisasi PAD 2015-2019 (Qy)	Konstanta	Hasil
2015	42703074888	243129588155	100%	17,56%
2016	54510843484	261446717628	100%	20,85%
2017	60286781919	305147586493	100%	19,76%
2018	68125506247	310633949252	100%	21,93%
2019	72952551153	333663494389	100%	21,86%

Sumber: Data Olahan.

Dari tabel 3, terlihat bahwa pada tahun 2015 pajak restoran telah memberikan sumbangan atau kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak sebesar 17,56% dari total penerimaan PAD sebesar Rp. 243.129.588.155. Tahun 2016 sebesar 20,85% dari total penerimaan PAD sebesar Rp. 261.446.717.628. Tahun 2017 19,76% dari total penerimaan PAD sebesar Rp. 305.147.586.493. Tahun 2018 sebesar 21,93% dari total penerimaan PAD sebesar Rp. 310.633.949.252. dan tahun 2019 sebesar 21,86% dari total penerimaan PAD sebesar Rp. 333.663.494.389.

#### 4.1.3. Persentase Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana Pajak Hotel memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Untuk mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak hotel periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD adalah:

$$Pn = \frac{Q_x}{Q_y} \times 100\%$$

Pn = Kontribusi Pajak X terhadap PAD  
 Qx = Realisasi Pajak X  
 Qy = Realisasi Pendapatan Asli Daerah  
 N = Tahun Tertentu

Tabel 4. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD.

Tahun (Pn)	Penerimaan Pajak Hotel (Qx)	Realisasi PAD 2015-2019 (Qy)	Konstanta	Hasil
2015	18553074826	243129588155	100%	7,63%
2016	20551727895	261446717628	100%	7,86%
2017	19903357946	305147586493	100%	6,52%

2018	21547525651	310633949252	100%	6,94%
2019	22002345615	333663494389	100%	6,59%

Sumber: Data Olahan.

Dari tabel 4, terlihat bahwa pada tahun 2015 pajak hiburan telah memberikan sumbangan atau kontribusinya terhadap PAD Kota Pontianak sebesar 7,63% dari total penerimaan PAD Rp. 243.129.588.155. Pada tahun 2016 sebesar 7,86% dari total penerimaan PAD Rp. 261.446.717.628. Pada tahun 2017 sebesar 6,52% dari total penerimaan PAD Rp. 305.147.586.493. Pada tahun 2018 sebesar 6,94% dari total penerimaan PAD sebesar Rp. 310.633.949.252. dan pada tahun 2019 sebesar 6,59% dari total penerimaan PAD sebesar Rp. 333.663.494.389.

#### **4.2. Pembahasan**

Pajak daerah merupakan salah satu komponen PAD, secara umum jumlah yang diberikan pos Pajak Daerah naik terus setiap tahunnya. Setiap tahun, peningkatan pendapatan di pos pajak daerah selalu meningkat, sehingga menjadi salah satu sumber penerimaan atau pendapatan yang mampu diandalkan sebagai PAD Kota Pontianak.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Pontianak, Pemerintah Kota Pontianak Mengelola 9 Jenis Pajak Yaitu:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Parkir
- 7) Pajak Sarang Burung Walet
- 8) BPHTB
- 9) PBB

Tiap Pajak Daerah memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Pontianak dan tabel 5 menunjukkan kontribusi pajak-pajak tersebut terhadap PAD.

**Tabel 5. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD**

<b>Pajak Daerah</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Rerata</b>
Pajak Hotel	7,02%	7,29%	6,93%	8,42%	7,82%	7,50%
Pajak Restoran	17,56%	20,85%	19,76%	21,93%	21,86%	20,39 %
Pajak Hiburan	7,63%	7,86%	6,52%	6,94%	6,59%	7,11%



Pajak Reklame	4,99%	5,92%	4,48%	4,67%	4,40%	4,89%
Pajak Penerangan Jalan	22,54%	22,26%	21,17%	22,20%	21,64%	21,96%
Pajak Parkir	1,15%	1,38%	1,30%	1,25%	1,21%	1,26%
Pajak Sarang Burung Walet	0,07%	0,06%	0,04%	0,05%	0,03%	0,05%
BPHTB	28,27%	22,95%	31,43%	26,77%	27,83%	27,45%
PBB	9,67%	9,78%	7,72%	7,22%	8,15%	8,51%

Sumber: Data Olahan.

#### **4.2.1. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak**

Dari tabel 5, terlihat bahwa kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak mengalami perubahan yang tidak terlalu signifikan disetiap tahunnya. Kenaikan dan juga penurunan yang terjadi tidaklah terlalu besar. Sesuai dengan tabel kriteria kontribusi pajak daerah maka pajak hotel dirasa sangat kurang kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak dengan nilai rerata kontribusi 5 tahun terakhir adalah 7,50% (0% - 10% termasuk dalam kriteria sangat kurang). Jika dibandingkan dengan dua variabel penelitian lain, kontribusi yang diberikan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak berada di posisi kedua, dan jika dibandingkan dengan seluruh variabel pajak daerah Pajak Hotel berada di posisi lima dalam kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak.

Sektor perhotelan berkaitan langsung dengan sektor pariwisata yang ada di Kota Pontianak. Berdasarkan penejelasan pada paragraf sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa sektor pariwisata di Kalimantan Barat khususnya Kota Pontianak memerlukan perhatian lebih. Pasalnya pariwisata di Kalimantan Barat Khususnya Kota Pontianak kurang diperhatikan oleh pemerintah setempat. Menurut Nugroho Henray Ekasasputra selaku ketua ASITA KALBAR yang disampaikan melalui wawancara dengan Pontianak Post pada tanggal 28 Januari 2020, beliau mengatakan bahwa saat ini Kalimantan Barat Belum mempunyai perda tentang pariwisata. Oleh karena itu sektor pariwisata tertinggal cukup jauh dibandingkan dengan daerah lain. Selain itu juga event yang digelar oleh pemerintah kurang melibatkan para stakeholder pariwisata. Dan juga selama ini event yang diadakan pemerintah hanyalah berskala lokal. Sedangkan yang kita ketahui bahwa masyarakat yang tinggal di Kota Pontianak tidak menginap di hotel, tidak makan di rumah makan, dan tidak menyewa transportasi sehingga tidak ada ekonomi yang bergerak.

Hal ini didukung oleh Bapak Sutarmidji selaku Gubernur Kalimantan Barat. Menurutnya untuk setiap tahunnya terdapat lebih dari dua ratus daerah yang datang ke Kota Pontianak untuk melakukan studi banding. Hal ini dinilai seharusnya dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah terutama melalui sektor perhotelan. Karena tamu yang datang tentunya akan menginap di hotel.

Dalam wawancara dengan Tribun News pada tanggal 23 Febuari 2020, Bapak Sutarmidji juga mengatakan akan mendorong laju perkembangan pariwisata Kalimantan Barat Khususnya Kota Pontianak dengan mengusulkan kepada Rektor Universitas Tanjungpura dan Politeknik negeri Pontianak untuk membuka jurusan perhotelan dan pariwisata. Yang diharapkan nantinya dengan dibukanya jurusan perhotelan dan pariwisata di Kota Pontianak dapat mendorong laju perkembangan sektor pariwisata yang ada di Kota Pontianak khususnya dan Kalimantan Barat secara umumnya.

#### **4.2.2. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak**

Berdasarkan tabel 5, terlihat kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Memiliki nilai kontribusi terbilang tinggi dibandingkan dengan 2 variabel penelitian lainnya yaitu Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. Dengan rerata kontribusi 5 tahun kebelakang sebesar 20,39% maka sesuai dengan tabel kriteria kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah, pajak Restoran memiliki kriteria kontribusi sedang (diantara 20% - 30%).

Nilai kontribusi yang diberikan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak tentunya masih dapat terus ditingkatkan lagi. Dilihat dari terus bertambahnya jumlah wajib pajak yang ada dan juga meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Hal ini juga tidak terlepas dari Stigma Kota Pontianak sebagai Kota dengan seribu warung kopi. Sesuai dengan artikel di salah satu portal berita online, Antara News Pemerintah Kota Pontianak sendiri mendukung kekayaan tradisi dan aktivitas ngopi di Kota Pontianak. Untuk mendukung sektor industri kreatif khususnya warung kopi, pemerintah Kota Pontianak mulai mengadakan gelaran ajang dan festival, salah satunya adalah Pontianak Fashion Coffe Week. Dengan diadakan festival tersebut diharapkan nantinya hal tersebut dapat membantu laju pertumbuhan usaha kreatif yang ada di Kota Pontianak Khususnya usaha Warung Kopi dan kuliner Kota Pontianak.

#### **4.2.3. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak**

Berdasarkan tabel 5, terlihat bahwa kontribusi yang diberikan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak mengalami penurunan 5 tahun kebelakang. Walaupun penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan hal itu dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah Kota Pontianak untuk memberikan perhatian bagi sektor hiburan yang ada di Kota Pontianak. Untuk 5 tahun kebelakang rata-rata kontribusi yang diberikan pajak hiburan kepada Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak sebesar 7,11%, paling kecil jika dibandingkan dengan dua variabel penelitian lainnya yaitu pajak hotel dan pajak restoran. Untuk kriteria nilai kontribusi, pajak hiburan termasuk dalam kriteria sangat kurang (0% - 10%).

Salah satu faktor yang menjadi alasan mengapa kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat rendah adalah pengenaan tarif pajak hiburan yang terlalu besar. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Pengusaha Tempat Hiburan (PPTH) KALBAR, Reza yang disampaikannya dalam portal berita online Pontianak Post tanggal 28 Januari 2020 bahwa pengusaha tempat hiburan dikenakan tarif sebesar 30% sedangkan pemerintah terus mempersempit ruang gerak para pengusaha tempat hiburan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terus menekan mereka. Ia juga menyampaikan bahwa beberapa waktu ini usaha tempat hiburan juga sepi. Sebagai contohnya tempat hiburan karaoke yang berkurang peminatnya sehingga antar pengusaha melakukan penekanan harga hingga sangat rendah.

Untuk itu pemerintah dirasa perlu memberikan perhatian kepada sektor usaha hiburan yang ada di Kota Pontianak.

## **5. Simpulan, Rekomendasi, dan Keterbatasan**

Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian tentang kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Pontianak adalah:

- 1) Dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) pajak hotel memberikan sumbangan atau kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak dengan rata-rata 7,50% atau tergolong dalam kontribusi sangat kurang sesuai dengan tabel kriteria kontribusi pajak daerah. Pemerintah Kota Pontianak yang dinilai kurang maksimal menjadi salah satu faktor mengapa kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel dirasa kurang maksimal.
- 2) Dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) pajak restoran memberikan sumbangan atau kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak dengan rata-rata sebesar 20,39% atau tergolong dalam kontribusi sedang sesuai dengan tabel kriteria kontribusi pajak daerah. Menjamurnya usaha restoran dan warung kopi yang ada di Kota Pontianak menjadi salah satu indikator mengapa pajak restoran memberikan kontribusi paling besar diantara dua variabel penelitian lainnya yaitu pajak hotel dan pajak hiburan.
- 3) Dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) pajak hiburan memberikan sumbangan atau kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak dengan rata-rata sebesar 7,11% atau tergolong dalam kontribusi sangat kurang sesuai dengan tabel kriteria kontribusi pajak daerah. Besaran tarif pajak yang dirasa memberatkan pengusaha serta peraturan pemerintah yang dirasa menekan pengusaha hiburan yang ada di Kota Pontianak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pajak hiburan memiliki nilai kontribusi sangat kurang.

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan, dapat diberikan rekomendasi bagi pihak yang terkait di penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kota Pontianak diharapkan dapat terus mengembangkan sektor pariwisata yang ada di Kota Pontianak. Sektor pariwisata tidaklah harus berupa alam ada juga pariwisata non alam yang dapat dikelola. Mengadakan event bertaraf nasional maupun internasional

juga menjadi salah satu cara untuk menarik pengunjung untuk datang berkunjung ke Kota Pontianak. Pemerintah setempat diharapkan juga dapat mengkaji kembali tentang besaran tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak agar terjadi keadilan bagi pengusaha-pengusaha yang masih berskala kecil.

- 2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak sebaiknya terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang memiliki hubungan sangat erat terhadap pendapatan asli daerah Kota Pontianak.
- 3) Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan wawancara langsung dengan dinas terkait serta dengan para pelaku usaha perhotelan, restoran, dan hiburan yang ada di Kota Pontianak untuk mendapatkan opini guna memperkuat hasil dari penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

Penelitian kali ini dibuat dengan sebaik-baiknya, namun penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang dimiliki penelitian ini adalah tidak adanya opini atau wawancara secara langsung dengan pihak terkait seperti pemerintah setempat, pengusaha hotel, pengusaha restoran, dan pengusaha tempat hiburan yang ada di Kota Pontianak guna memperkuat hasil dari penelitian ini.

### **Referensi**

- Abdul Halim dkk. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ahmad Yani. (2008). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Alfiandi, Mulia Andirfa dan M. Luthfi Alfahmi. (2017). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Pendaptan Asli Daerah Kota Lhoksema. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan, Volume 3, Nomor 3, November 2017*.
- Anak Agung Gde Mantra Suarjana dan Ni Nyoman Yintayani (2018). Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Dampaknya Pada Alokasi Biaya Modal pada Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Jurnal Bisnis Kewirausahaan, Vol. 14, No 2, Juli 2018*.
- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Badrudin, Rudy. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Cornelin G. Kamagi, Julie J. Sondakh, Tressje Runtu (2016). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa tenggara Periode 2011-2015. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 16 No. 4 Tahun 2016*.
- Ervina Yulia Candra (2015). Pengaruh Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi (Periode 2004 – 2013).
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hanif Nurcholis. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2019). <http://kbbi.web.id/patuh>, Diakses pada Tanggal 25 Desember 2019.
- Lea Sad Dwi Winda Sari Mien Lukitorini. (2015). Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Ni Luh Putu Ari Priyanti, I Wayan Suwendra, Fridayana Yudiaatmaja. (2014). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2013. *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen, Volume 2*.
- Nuraeni. (2015). Pengaruh Pajak Hotel dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi (JAK)*.
- Pemerintah Kota Pontianak (29 Oktober 2019). Cafe dan Warung Kopi Terdaftar. Diakses Pada 20 Mei 2020, dari <https://data.pontianakkota.go.id/tr/dataset/cafe-dan-warung-kopi-terdaftar/resource/a7aa1c46-b3f9-469b-8558-7fe8b3a81700>, diakses pada tanggal 05 Juni 2020.
- Pemerintah Kota Pontianak, (01 Febuari 2020). Rumah Makan, Diakses pada 20 Mei 2020, dari <https://data.pontianakkota.go.id/tr/dataset/rumah-makan/resource/564e140a-3156-4460-ac95-68fddee74eb3>. Diakses pada tanggal 05 Juni 2020.
- Pontianak Post, (28 Januari 2020). Potensi Besar, Tenaga Kurang, Belum Mampu Sedot Wisatawan, Diakses pada 20 Mei 2020, dari <https://pontianakpost.co.id/potensi-besar-tenaga-kurang-belum-mampu-sedot-wisatawan/>, diakses pada tanggal 05 Juni 2020.
- Pontianak Post, (28 Januari 2020). Pajak Restoran Jangan Pukul Rata, diakses pada 20 Mei 2020, dari <https://pontianakpost.co.id/pajak-restoran-jangan-pukul-rata/>
- Pontianak Tribun News, (23 Febuari 2020). Gubernur Sutarmidji Dorong Pembukaan Akademi Pariwisata dan Perhotelan Kalimantan Barat. Diakses pada 21 mei 2020, dari <https://pontianak.tribunnews.com/2020/02/23/gubernur-sutarmidji-dorong-pembukaan-akademi-pariwisata-dan-perhotelan-di-kalbar>, diakses pada 05 Juni 2020.
- Peraturan Daerah Kota Pontianak NO. 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak.
- Rista Anggraini. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung periode 2012 – 2016. Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Santoso, Singgih. (2016). Panduan Lengkap SPSS Versi 23. Jakarta : Elekmedia Computindo.
- Soekarwo. (2003). Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah. Airlangga Univerity Press, Surabaya.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Vidya Paramita (2013). Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Studi Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung).

- Wahyu Indro Widodo dan Bambang Guritno. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta. *Jurnal Visi Manajemen* Vol. 2 , No 2, Tahun 2017.
- Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 – 2016). *e-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unism*